

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia

Aldi Primananda<sup>1</sup>, Yeniwati<sup>2</sup>, Dwirani Puspa Artha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia

\*Korespondensi: [aldiprimananda@gmail.com](mailto:aldiprimananda@gmail.com) [yeniwati.unp@gmail.com](mailto:yeniwati.unp@gmail.com)

### Info Artikel

#### Diterima:

22 Mei 2023

#### Disetujui:

29 Juni 2023

#### Terbit daring:

01 Juni 2023

DOI: -

### Sitasi:

Primananda, A, Yeniwati & Artha, D,P (2023).  
Pengaruh Pengeluaran  
Pemerintah Sektor Kesehatan  
dan Bantuan Sosial Terhadap  
Kualitas Sumber Daya Manusia  
di Indonesia, 5(2).

### Abstract

*The study aims to find out the effect of (1) government budgeting in health sector on quality of human resources in Indonesia (2) non cash food assistance programme on quality on human resources in Indonesia (3) smart indonesia programme on quality of human resources in Indonesia (4) government budgetin in health sector, non cash food assistance program and smart indonesia program on quality of human resources in Indonesia. This study uses secondary data which source of Badan Pusat Statistik Indonesia, DJPK Kemenkeu, Kemensos RI and PIP Kemendikbud. This study uses panel data analysis with Random Effect Model (REM) on 34 provinsi In Indonesia during 2018-2020. The result of the study are (1) Government budgeting in health sector has positively significant on quality of human resources (2) Non cash food assistance programme has positively insignificant on quality of human resources (3) Smart Indonesia Programme has negatively significant on quality of human resource (4) Government budgeting in health sector, Non cash food assistance programme and Smart Indonesia Programme have impact on quality of human resources.*

**Keywords:** HDI, Human Resources Quality, Government Expenditures, Health, Social Assistance, BPNT, PIP

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh (1) pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia (2) program bantuan pangan non tunai terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia (3) program Indonesia pintar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia (4) pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, program bantuan pangan non tunai, serta program Indonesia pintar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia, DJPK Kemenkeu, Kemensos, dan PIP Kemendikbud. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan metode *Random Effect Model* (REM) dengan *cross section* 34 provinsi di Indonesia dan *time series* 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia (2) Program bantuan pangan non tunai berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia (3) Program Indonesia pintar berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia (4) Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, program bantuan pangan non tunai, serta program Indonesia pintar secara bersama sama berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia.

**Kata Kunci:** IPM, Kualitas SDM, Pengeluaran Pemerintah, Kesehatan, Bansos, BPNT, PIP

Kode Klasifikasi JEL: O15, H51, H75

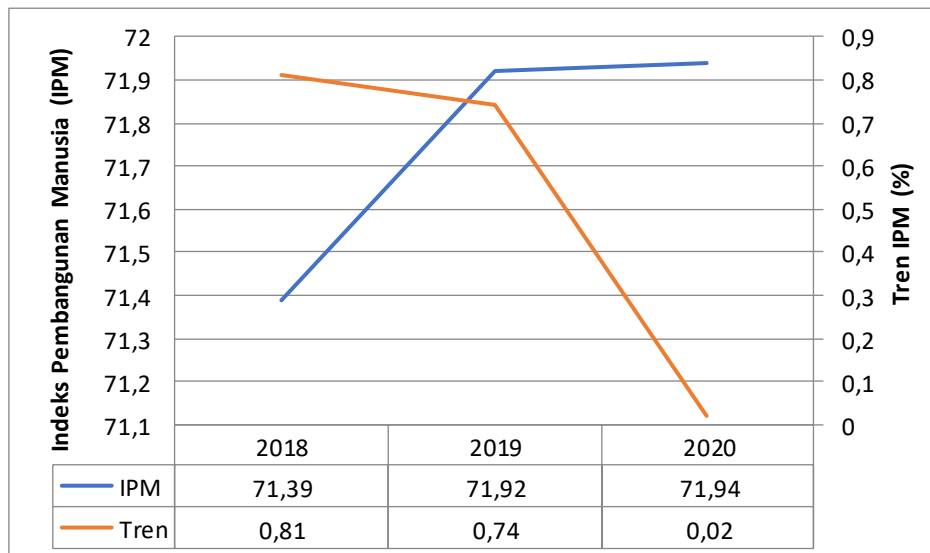
## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan publik menjadi lebih baik demi tercapainya pembangunan yang maksimal, pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek di seluruh bidang, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan publik, seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta pembangunan di bidang sosial lainnya. Pembangunan manusia merupakan salah satu aspek vital yang perlu diperhatikan pemerintah. Pembangunan ini diartikan sebagai suatu proses guna melipatgandakan pilihan-pilihan yang ada pada manusia. Dari pilihan itu, pilihan yang paling utama yaitu untuk berumur panjang serta sehat, memiliki ilmu pengetahuan, serta untuk memiliki saluran terhadap sumber daya yang diperlukan sehingga bisa hidup dengan layak (BPS Sumatera Barat, 2021). Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya diperlukan untuk menghasilkan pilihan ini, kualitas manusia ini dapat dilihat pada indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia yaitu sebuah indeks pengukuran perbandingan pada harapan hidup, melek huruf, pendidikan, serta standar hidup untuk seluruh negara di dunia (Jasasila, 2020).

Kualitas Sumber Daya Manusia yang di ukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar standar hidup. Sebagai indikator standar hidup, IPM terdiri atas tiga aspek dasar. Aspek-aspek tersebut antara lain berumur panjang dan sehat, pengetahuan beserta kehidupan yang layak. Karena berbagai faktor, ketiga aspek tersebut memiliki penjelasan yang sangat luas. Untuk mengukur aspek kesehatan, dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir serta untuk mengukur aspek pengetahuan dengan menggunakan kombinasi indikator angka melek huruf serta rata-rata lama sekolah. Lalu untuk mengukur kehidupan yang layak, dengan menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap beberapa kebutuhan pokok yang bisa dilihat pada rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup yang layak (BPS Sumatera Barat, 2021). Jika ketiga aspek indikator indeks ini tinggi, maka dapat dikatakan masyarakat akan semakin sejahtera begitupun sebaliknya, jika ketiga aspek indikator ini menurun hingga dapat diucapkan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin menurun (Zainuddin, 2015).

Sejak dari tahun 1990 perkembangan tingkat taraf hidup manusia (indeks HDI) di seluruh dunia diteliti serta laporannya diterbitkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP). Menurut UNDP (2020) Dalam laporan pembangunan manusia Indonesia, nilai IPM Indonesia pada tahun 2019 yaitu 0,718 yang meletakkan posisi Indonesia pada kategori pembangunan manusia yang tinggi, meletakkan pada 107 dari 189 negara dan wilayah. Menurut UNDP (2020) Jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, IPM Indonesia masih berada dibawah IPM Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina, meskipun tren peningkatan IPM di Indonesia dari tahun 1990 sampai saat ini naik sebesar 37,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia perlu memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah persaingan global saat ini. Berikut adalah pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2018-2020.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan selama tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu sebesar 71.39 pada tahun 2018 dan meningkat hingga sebesar 71.94 pada tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, nyatanya tren peningkatan IPM tersebut justru mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu sebesar 0,81% pada tahun 2018 dan menurun menjadi 0,02% pada tahun 2020. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa faktor turunnya rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan dan Pandemi Covid-19 ikut memberikan dampak perlambatan pertumbuhan IPM pada tahun 2020 di bandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

**Gambar 1. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia di Indonesia Tahun 2018-2020**

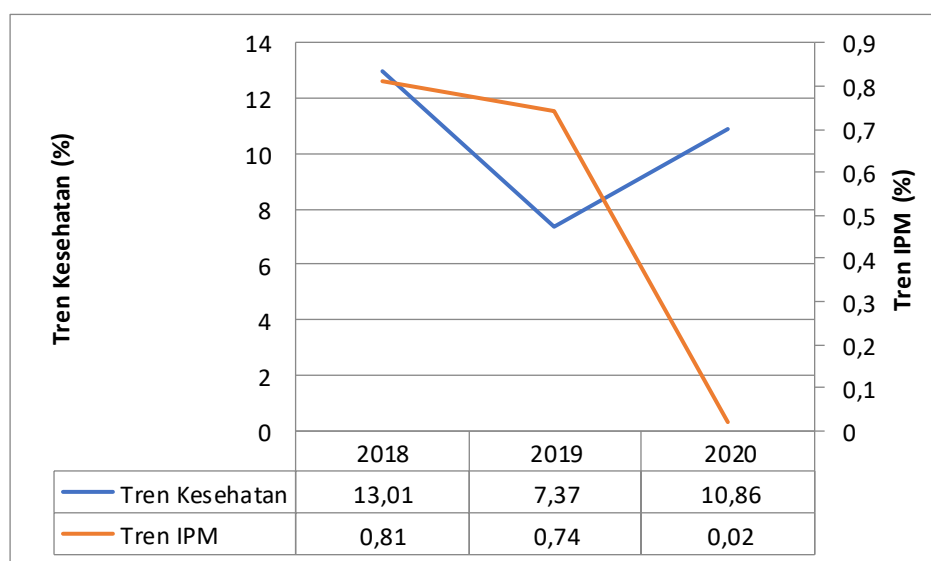
Menurut Mathai dkk. (2020) Indeks pembangunan manusia dapat dipengaruhi oleh pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor, salah satunya adalah pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan serta perlindungan sosial. Menurut Rostow dalam model pembangunan juga menguraikan bahwasannya pembangunan ekonomi, aktifitas pemerintah beranjak dari penyediaan prasarana kepada pengeluaran-pengeluaran guna aktivitas sosial berupa program kesejahteraan beserta program pelayanan kesehatan. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk program kesejahteraan dan aktivitas sosial tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk kebijakan pengeluaran bantuan sosial. Dimana Kebijakan ini dilakukan pemerintah sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (Mangkoesoebroto, 2001).

Menurut Sukirno (2005) menyatakan bahwasannya pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yang mana digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat guna mendorong peningkatan sumber daya manusia. Dalam mengeluarkan anggaran untuk proses pembangunan, pemerintah membagi kedalam beberapa fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penggolongan belanja pemerintah menurut fungsi berupa pelayanan umum, ketertiban serta ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan serta fasilitas umum, kesehatan, pariwisata serta budaya, pendidikan serta perlindungan sosial. Menurut Mangkoesoebroto (2016) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang membuat sesuatu kebijakan tertentu mempunyai efek biaya yang wajib dikeluarkan. Biaya itu didanakan dari anggaran pemerintah yang sudah menjadi pengeluaran untuk pemerintah. Anggaran yang dialokasikan bagi sesuatu bidang membuktikan janji pemerintah terhadap kasus pada bidang itu.

Menurut Kemenkeu (2022) Program perlindungan sosial merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan bangsa, khususnya bagi mereka yang miskin dan rentan terhadap kemiskinan. Indonesia telah memiliki program perlindungan sosial yang beragam seperti mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Pra Kerja, Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Program Bidikmisi Anak Usia Sekolah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta lain sebagainya. Selain itu, pengeluaran pemerintah pada sektor perlindungan sosial sebagai

variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia lebih ditekankan untuk mendukung atau membantu masyarakat miskin dan rentan terhadap kemiskinan karena status mereka sebagai pihak yang terkena dampak signifikan ketika terjadi guncangan ekonomi seperti meningkatnya harga barang dan bahan bakar (Adah dkk., 2019).

Menurut Mankiw (2006) pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan cara melakukan penyempurnaan kualitas modal manusia, yang terdiri dari pendidikan serta kesehatan. Perbaikan pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia diperlukan mampu memperluas kesempatan guna mencapai kehidupan yang layak. Modal manusia yang tertuju pada perbaikan pendidikan serta kesehatan adalah tujuan pembangunan mendasar pada suatu wilayah. Berikut adalah pertumbuhan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di Indonesia tahun 2018-2020.



Sumber : DJPK Kemenkeu, 2022

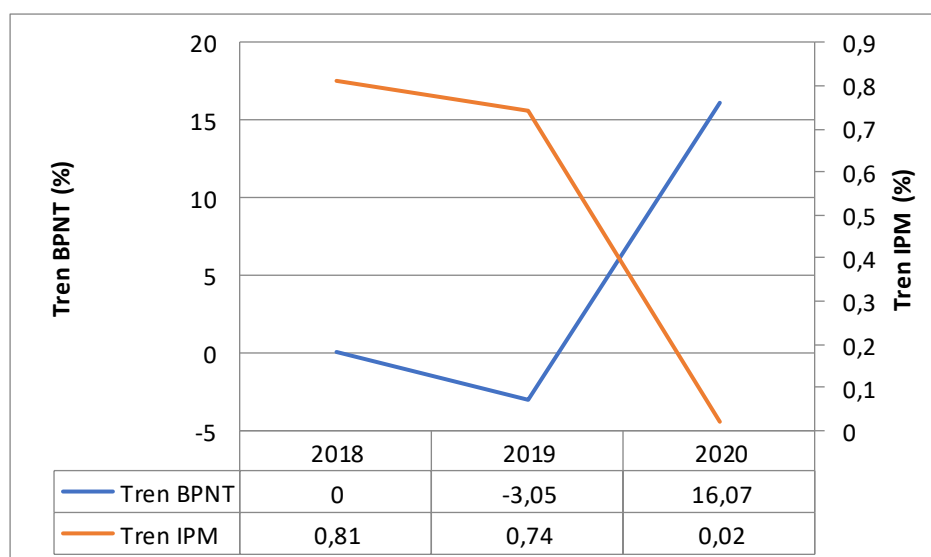
### **Gambar 2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Juta Rupiah ) di Indonesia Tahun 2018-2020**

Gambar 2 memperlihatkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia mengalami pertumbuhan tren yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami peningkatan sebesar 10,86% dibandingkan tahun 2019 yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 7,37%. Disisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru mengalami tren pertumbuhan yang menurun pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,03% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 0,74%. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tren yang meningkat pada pengeluaran pemerintah bidang kesehatan justru diikuti tren penurunan pada Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini bertentangan dengan Covey pada penelitian Nasution dkk (2021), bahwa untuk menciptakan manusia yang produktif, kesehatan adalah hal yang paling penting dan harus ditingkatkan kualitasnya. Fenomena ini diduga terjadi karena Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kualitas pembangunan manusia menurun serta mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan pengeluaran sektor kesehatan dalam jumlah lebih banyak untuk memberikan fasilitas yang memadai dan perawatan yang lebih baik bagi masyarakat yang terkena COVID-19 (Kemenkeu, 2020)

Selanjutnya Program Bantuan Pangan Non Tunai juga berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Karena Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah program rutin dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bahan pangan sehingga dengan adanya program ini tentunya dapat meningkatkan kualitas sumber

daya manusia. Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah upaya memperbarui Program Subsidi Rastra yang diwujudkan berdasarkan pedoman Presiden RI guna meningkatkan efektifitas serta ketetapan sasaran program, dan guna mendorong komprehensif keuangan. Penyaluran bantuan pangan non tunai ini dilakukan dengan cara bertahap dimulai dari tahun 2017 di beberapa daerah yang tertentu di Indonesia dengan akses serta fasilitas yang memadai (Bappenas, 2017). Program Bantuan Pangan Non tunai yaitu bantuan pangan dengan wujud non tunai yang diberikan oleh pemerintah terhadap Keluarga Penerima Manfaat perbulannya, dengan menerapkan sistem akun elektronik sehingga hanya dapat dipergunakan untuk berbelanja bahan pangan pada e-warong yang telah berkolaborasi dengan bank Himbara. Sehingga dengan adanya program ini dapat meringankan beban KPM dan meningkatkan akses rakyat miskin akan gizi yang seimbang, sehingga secara garis besar penyaluran bantuan ini tentunya dapat berdampak bagi peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan penerima manfaat. Besaran manfaat yang diterima oleh KPM dalam program BPNT pada mulanya senilai Rp 110.000.- kemudian mengalami 2 kali kenaikan yakni Rp 150.000.- dan sekarang ini sebesar Rp 200.000/KPM/bulan yang mana tidak dapat diambil secara tunai, hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan sesuai kebutuhan di E-warong (Agustina & Megawati, 2022).

Berikut adalah pertumbuhan program bantuan pangan non tunai di Indonesia pada tahun 2018-2020.

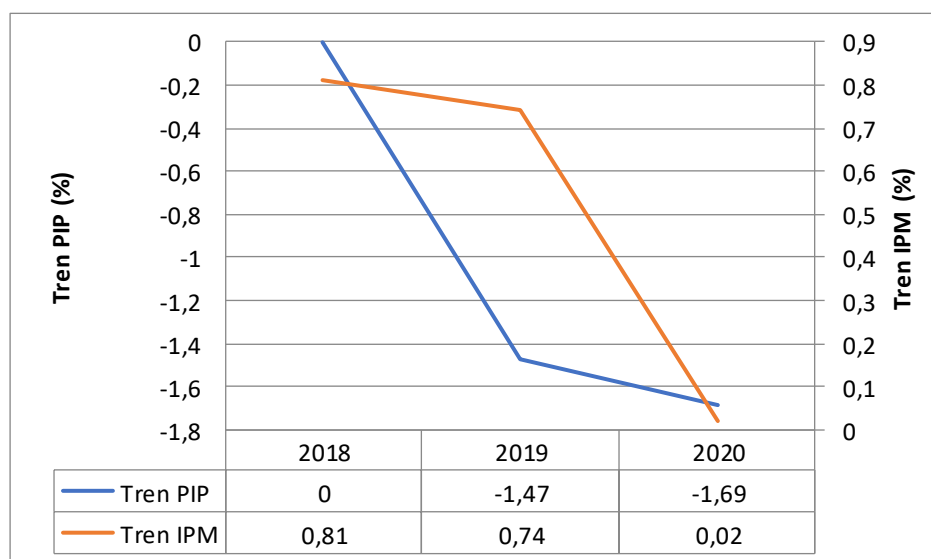


Sumber : Kemensos RI, 2022

**Gambar 3 Pertumbuhan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Jumlah Orang Penerima) di Indonesia Tahun 2018-2020**

Gambar 3 memperlihatkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Indeks Pembangunan Manusia mengalami pertumbuhan tren yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pengeluaran bantuan pangan non tunai (BPNT) mengalami pertumbuhan peningkatan yang signifikan sebesar 16,07% dibandingkan tahun 2019 yang justru berada pada tren negatif sebesar -3,05%. Disisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru mengalami tren pertumbuhan yang menurun pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,03% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 0,74%. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran program bantuan pangan non tunai tidak menyebabkan meningkatnya indeks pembangunan manusia. Hal ini justru berbanding terbalik dengan tujuan dan pencapaian yang diharapkan oleh pemerintah melalui program BPNT ini untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Kemensos, 2022).

Selain itu, program Indonesia pintar berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Karena program indonesia pintar merupakan program rutin dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan pendidikan sehingga tentunya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bentuk pengeluaran sosial di bidang pendidikan yang ikut menunjang peningkatan kesejahteraan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Pada dasarnya PIP yaitu penuntasan daripada program Bantuan Siswa Miskin. Permendikbud No.12 Tahun 2015 menguraikan bahwasannya Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan pada anak usia sekolah dari pada keluarga pemilik Kartus Keluarga Sejahtera, dengan kata lain yang memenuhi persyaratan yang sudah di tetapkan sebelumnya yang dapat dilihat dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar pada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu pemilik KKS. Penerima KIP yaitu anak usia 6-21 tahun yang menempuh pendidikan maupun yang tidak, serta berasal dari keluarga penerima KKS ataupun yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan adanya program ini tentu akan memiliki tujuan yang akan dicapai dengan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pendidikan. Pendidikan yang baik tentu akan menciptakan kualitas SDM yang cerdas dan berkualitas (Yusup dkk., 2019). Dikutip dari Eka Rahmawati (2022) Bantuan PIP disampaikan pada peserta didik yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Kuantitas dana yang diberikan untuk peserta didik adalah SD/MI/Paket A sebesar Rp. 450.000 per tahun, SMP/MTS/Paket B sebesar Rp. 750.000 per tahun, SMA/SMK/MA/Paket C sebesar Rp. 1.000.000 per tahun.



Sumber : PIP Kemendikbud, 2022

#### **Gambar 4 Pertumbuhan Program Indonesia Pintar (PIP) (Jumlah Orang Penerima) di Indonesia Tahun 2018-2020**

Gambar 4 memperlihatkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami pertumbuhan tren yang menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Program Indonesia Pintar (PIP) mengalami tren pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -1,69% yang menurun dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar -1,47%. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,03% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 0,74%. Fenomena ini menunjukkan bahwa penurunan Program Indonesia Pintar (PIP) akan diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Penurunan program indonesia pintar hingga mencapai tren yang negatif diduga karena Pandemi COVID-19 yang menyebabkan fokusnya pemerintah pada pengeluaran program kesehatan serta kurangnya realisasi pemerintah mengenai program Indonesia pintar pada masyarakat



dan penyebarannya tidak merata sehingga terdapat masalah atau fenomena pada tahun tersebut. Menurut Zamjani (2018) pemerintah bersama dengan kemensos perlu berkolaborasi dalam mempercepat proses pembaruan dan pemadanan data sehingga kesalahan target penerima dapat diminimalisir, dengan begitu masyarakat yang memiliki kualitas kesejahteraan yang rendah bisa terbantu dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan bantuan sosial terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang bersumber dari situs resmi <https://bps.go.id/>, <https://djpk.go.id/>, <https://pip.kemdikbud.go.id/>, serta kementerian sosial republik Indonesia. Jenis data yang dipakai berupa data panel yang mana gabungan dari data *time series* beserta *cross section*. Data *time series* dari periode 2018 sampai 2020 sedangkan data *cross section* yaitu 34 Provinsi di Indonesia. Data yang diteliti meliputi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, bantuan pangan non tunai, program Indonesia pintar serta kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan sifatnya data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuantitatif yang mana metode riset yang berfokus pada penggunaan angka, tabel, grafik, yang menunjukkan perkembangan dari pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, bantuan pangan non tunai, program Indonesia pintar serta kualitas sumber daya manusia. Metode analisis data merupakan metode yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. Pada penelitian ini menggunakan model regresi data panel serta didapatkan hasil estimasi *Random Effect Model* (REM). Dengan menggunakan analisis regresi panel maka dapat diprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Software Eviews 9 serta Microsoft Excel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terdapat 4 variabel yang diteliti yaitu terdapat 1 variabel terikat dan 3 variabel bebas. Yang mana variabel bebas terdiri dari pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, bantuan pangan non tunai dan program Indonesia pintar, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Berdasarkan hasil regresi estimasi *Random Effect Model* pada gambar diatas maka dapat diperoleh persamaan :

$$Y_{it} = 62.343 + 1.144\log(\text{KESEHATAN})_{it} + 0.208\log(\text{BPNT})_{it} - 0.735\log(\text{PIP})_{it} \quad (1)$$

Pada hasil yang didapat, memperlihatkan bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya dengan nilai R-Squared adalah 0.237 yang berarti bahwasannya variabel bebas di model mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 23.7% serta 77.3% dijelaskan oleh variabel lain dari luar penelitian ini.

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan dari hasil analisis data serta pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan pada penelitian ini bahwasannya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Peristiwa ini diketahui dari nilai probabilitas pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 0.0000 dengan tingkat  $\alpha$  yaitu 5%. Artinya, ketika pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami peningkatan maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat sebesar 0.0000 persen. Peristiwa ini berarti bahwasannya ketika pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami peningkatan, maka kualitas sumber daya manusia juga akan mengalami

peningkatan yang signifikan, dan begitupun sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami penurunan, maka kualitas sumber daya manusia juga mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Susanti & Hidayat (2020) yang menyatakan bahwasannya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan bahwasannya besarnya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipergunakan untuk berbagai program yang tepat sehingga memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28H Ayat 1) dan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan bahwasannya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan upaya guna memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Kuncoro, 2013). Serta juga didukung oleh Teori Public Finance (Musgrave, Richard A Musgrave, 1989) yang menganggap bahwasannya pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berlaku dimana peran pemerintah amat dibutuhkan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang bisa diukur dengan angka harapan hidup yang berupa salah satu indikator dari Indeks Pembangunan Manusia.

### **Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwasannya program bantuan pangan non tunai memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Peristiwa ini diketahui dari nilai probabilitas program bantuan pangan non tunai 0.3809 dengan tingkat  $\alpha$  yaitu 5%. Artinya, ketika program bantuan pangan non tunai mengalami peningkatan maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat sebesar 0.3809 persen. Hal ini berarti bahwa ketika program bantuan pangan non tunai mengalami peningkatan, maka kualitas sumber daya manusia juga akan mengalami peningkatan namun tidak signifikan, dan begitupun sebaliknya, apabila program bantuan pangan non tunai mengalami penurunan, maka kualitas sumber daya manusia juga mengalami penurunan. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Tamara & Yenniwati (2020) yang menyatakan bahwasannya pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, dimana program bantuan pangan non tunai ini termasuk kedalam program bantuan sosial.

### **Pengaruh Program Indonesia Pintar terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan dari hasil olahan data serta pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwasannya program Indonesia pintar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Peristiwa ini diketahui dari nilai probabilitas program Indonesia pintar 0.0367 dengan tingkat  $\alpha$  yaitu 5%. Artinya, ketika program Indonesia pintar mengalami peningkatan maka kualitas sumber daya manusia akan menurun sebesar 0.0367 persen. Hal ini berarti bahwa ketika program Indonesia pintar mengalami peningkatan, maka kualitas sumber daya manusia mengalami penurunan yang signifikan, dan begitupun sebaliknya, apabila program Indonesia pintar mengalami penurunan, maka kualitas sumber daya manusia mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Setiawan & Fikriah (2020) yang menyatakan bahwasannya pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dimana program Indonesia pintar ini termasuk kedalam program perlindungan sosial.



## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis Regresi Panel dengan menggunakan *Random Effect Model* dan pembahasan terhadap hasil dari penelitian antara variabel bebas dan variabel terikat, maka dapat diambil simpulannya sebagai berikut : (1) Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa ketika Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami peningkatan maka kualitas sumber daya manusia tentu akan mengalami peningkatan yang signifikan. (2) Program bantuan pangan non tunai berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa ketika program bantuan pangan non tunai mengalami peningkatan maka kualitas sumber daya manusia tentu mengalami peningkatan namun tidak signifikan. (3) Program Indonesia pintar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa ketika program Indonesia pintar meningkat maka kualitas sumber daya manusia akan mengalami penurunan yang signifikan.

Berdasarkan uraian dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Maka dari itu, disarankan kepada pemerintah untuk mempertahankan program-program kesehatan yang sudah berjalan dengan baik serta disarankan agar pemerintah juga memperhatikan anggaran kesehatan untuk provinsi yang masih rendah tingkat kualitas sumber daya manusianya seperti provinsi papua barat dan papua. Bantuan pangan non tunai berdampak positif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Maka dari itu, disarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan sasaran orang yang akan menerima bantuan ini, karena pengaruhnya sudah positif akan tetapi manfaatnya tidak terasa oleh penerima bantuan, sehingga diharapkan kedepannya manfaat dari bantuan ini dapat dirasakan oleh penerima bantuannya, serta disarankan kepada pemerintah juga memperhatikan sasaran orang yang menerima bantuan ini pada provinsi yang masih rendah kualitas sumber daya manusianya seperti papua barat dan papua. Program Indonesia pintar berdampak negatif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Maka dari itu, disarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan sasaran orang yang akan menerima bantuan ini, karena pengaruhnya masih negatif terhadap kualitas sumber daya manusia, akan tetapi jika dilihat dari manfaatnya, manfaatnya sudah dapat dirasakan oleh penerima bantuan, serta disarankan kepada pemerintah juga memperhatikan sasaran orang yang menerima bantuan ini pada provinsi yang masih rendah kualitas sumber daya manusianya seperti papua barat dan papua. Penulis mengharapkan peneliti maupun pengembang ilmu selanjutnya dapat melakukan pengembangan lebih lanjut atas pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, program bantuan pangan non tunai, program Indonesia pintar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia karena penulis menyadari penelitian ini masih terdapat kekurangan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adah, M., Pudjihardjo, & Burhan, U. (2019). The Effect Of Government Spending On Education, Health and Social Protection Sectors Towards The Human Development Index in Central Kalimantan. *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, 5(1), 42–48.
- Agustina, D., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 10(1), 175–190.
- Bappenas. (2017). *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*.
- BPS Sumatera Barat. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia*. [sumbar.bps.go.id. https://sumbar.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html](https://sumbar.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html)
- Eka Rahmawati. (2022). *Mengenai PIP dan Besaran Dana yang Diterima*. Nusamandiri.
- Jasasila, J. (2020). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari 2011 -2019. *Eksis: Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 40. <https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.192>
- Kemenkeu. (2020). *DJPB Kemenkeu*.
- Kemenkeu. (2022). *Kementerian Keuangan*.
- Kemensos. (2022). *Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Tunai*.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (4 ed.). Erlangga.
- Mangkoesoebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik* (Edisi 3). FE UGM.
- Mangkoesoebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik* (Edisi 3). BPFE.
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Ketiga). Salemba Empat.
- Mathai, K., Duenwald, C., & Guscina, A. (2020). Social Spending for Inclusive Growth in the Middle East and Central Asia. In *International Monetary Fund* (Nomor 20).
- Musgrave, Richard A Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practise*. Mc Graw Hill Book Company.
- Nasution, D. P., Daulay, M. T., & Handani, E. (2021). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan*. 14(1), 33–49.
- Setiawan, A., & Fikriah, F. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di .... *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi ...*, 5(4), 212–221.
- Statistik, B. P. (2021). *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/>.
- Sukirno, S. (2005). *Pengantar Mikro Ekonomi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Susanti, E., & Hidayat, N. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. *Eco-Build Journal*, 4(2), 25–34.
- Tamara, Y., & Yewiwati, Y. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial Dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(3). <https://doi.org/10.24036/jkep.v2i3.10287>
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>
- Zainuddin. (2015). Analisis Dampak Inflasi, PDRB Dan Perkembangan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1(1), 45–52.
- Zamjani, I. (2018). Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi Di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 64–82. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v11i2.225>